

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

#### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENAMBANGAN PASIR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO JAWA TIMUR**

Menurut Teori Grindlle:

1. Kepentingan kelompok sasaran
  - Dalam menjalankan kebijakan pengendalian penambangan pasir tentu saja melibatkan banyak kepentingan. Siapa sajakah pihak atau kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini? (Kepala bagian Sumber Daya Alam, Staff Sumber Daya Alam, dan masyarakat 3 orang).
2. Tipe Manfaat
  - Tipe manfaat seperti apa yang di terima oleh masyarakat ? (Kepala bagian Sumber Daya Alam, Staff Sumber Daya Alam, dan masyarakat 3 orang).
3. Perubahan yang diinginkan
  - Kebijakan yang di tetapkan melalui Peraturan Daerah Bojonegoro tentang penegdalian penambangan pasir tentu saja menghasilkan dampak dan perubahan yang signifikan. Dampak dan perubahan seperti apa yang di dapatkan oleh sasaran kebijakan ini? (Kepala bagian Sumber Daya Alam, Staff Sumber Daya Alam lingkungan, dan masyarakat 3 orang).
4. Pengambilan keputusan
  - Apakah pengambilan keputusan kebijakan pengendalian penambangan pasir sudah tepat sasaran sesuai dengan yang di targetkan oleh pemerintah dan jelaskan ? (Kepala bagian Sumber Daya Alam, Staff Sumber Daya Alam, dan masyarakat 3 orang).
5. Pelaksana kebijakan
  - Apakah Pelaksana kebijakan dalam Menjalankan kebijakan ini sudah baik dan jelaskan? (Kepala bagian sumber daya alam, Staff Sumber Daya Alam, dan masyarakat 3 orang).

6. Sumber daya

- Bagaimana dengan sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan ini? (Kepala bagian Sumber Daya Alam, Staff Sumber Daya Alam, dan masyarakat 3 orang).

7. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat

- Siapa aja Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang pengendalian penambangan pasir ini? (Kepala bagian Sumber Daya Alam, Staff Sumber Daya Alam, dan masyarakat 3 orang).

8. Karakter lembaga

- Dalam pengaruh keberhasilan mengenai kebijakan ini, siapa saja pihak yang berkuasa dan berperan dalam implementasi kebijakan pertambangan pasir? (Kepala Sumber Daya Alam, Staff Sumber Daya Alam, dan masyarakat 3 orang).

9. Kepatuhan dan daya tanggap

- Sejauh mana kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran dalam menanggapi Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 1 tahun 2005 yang sudah di laksanakan ? (Kepala bagian Sumber Daya Alam, Staff Sumber Daya Alam, dan masyarakat 3 orang).

## HASIL WAWANCARA PENELITIAN

### PERTANYAAN

Informan Ibu Musdholifah selaku Kepala sub bagian sumber daya alam Kabupaten Bojonegoro

Menurut Teori Grindlle:

1. Kepentingan kelompok sasaran
  - Dalam menjalankan kebijakan pengendalian penambangan pasir tentu saja melibatkan banyak kepentingan. Siapa sajakah pihak atau kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini?
2. Tipe Manfaat
  - Tipe manfaat seperti apa yang di terima oleh masyarakat ?
3. Perubahan yang diinginkan
  - Kebijakan yang di tetapkan melalui Peraturan Daerah Bojonegoro tentang penegdalian penambangan pasir tentu saja menghasilkan dampak dan perubahan yang signifikan Dampak dan perubahan seperti apa yang di dapatkan oleh sasaran kebijakan ini?
4. Pengambilan keputusan
  - Apakah pengambilan keputusan kebijakan pengendalian penambangan pasir sudah tepat sasaran sesuai dengan yang di targetkan oleh pemerintah dan jelaskan ?
5. Pelaksana kebijakan
  - Apakah Pelaksana kebijakan dalam Menjalankan kebijakan ini sudah baik dan jelaskan?
6. Sumber daya
  - Bagaimana dengan sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan ini?
7. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat
  - Siapa aja Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang pengendalian penambangan pasir ini?
8. Karakter lembaga
  - Dalam pengaruh keberhasilan mengenai kebijakan ini, siapa saja pihak yang berkuasa dan berperan dalam implementasi kebijakan pertambangan pasir?
9. Kepatuhan dan daya tanggap
  - Sejauh mana kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran dalam menanggapi Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 1 tahun 2005 yang sudah dilaksanakan?

## JAWABAN

1. Untuk kepentingan kelompok sasaran yaitu pemerintah bersama penegak hukum dan dinas yang terkait untuk mengendalikan masyarakat dalam penambangan pasir dibengawan solo dengan mengadakan sosialisasi dan penertiban penambang pasir secara langsung itu dapat mempengaruhi penambang lain dan dengan adanya bantuan dari masyarakat sekitar untuk meningkatkan ketaatan dalam peraturan yang ada. Seringnya bersosialisasi pemerintah dapat mengendalikan masyarakat. Menurut saya kepentingan yang mempengaruhi kebijakan ini pemerintah dan masyarakat yang harus saling bekerja sama dalam mempengaruhi kelompok sasaran.
2. Pasti dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2005 bukan tidak lain untuk melindungi lingkungan kawasan bengawan solo di Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. dengan Menertibkan penambangan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat disekitar sungai untuk memanfaatkan bantaran sungal untuk ditanami tanaman buah dan sayuran sehingga terwujud adanya rasa ikut memiliki mengamankan, melestarikan sungai serta bangunan – bangunan pengairan atau bangunan fasilitas umum lainnya agar terhindar dari kerusakan akibat penambangan.
3. Perubahan yang diinginkan pemerintah dalam kebijakn ini adalah agar masyarakat bisa mentaati peraturan-peraturan yang ada. Karena kebijakan tersebut dibuat guna menciptakan daerah bojonegoro yang kondusif dan aman. dan terhindar dari kerusakan infratrktur seperti rumah dan jembatan.
4. Kebijakan peraturan ini kan tentang pengendalian penambangan pasir dan di bojonegoro dilintasi sungai bengawan solo. Kebijakan itu sudah tepat pada sasaran karena Sungai tersebut sebagai sumber penghasiln bagi masyarakat. Terutama pada penambangan pasir yang sekarang marak-maraknya kegiatan penambangan. Dengan adanya kebijakan itu dapat mengendlikan penambangan pasir yang ada dibantarn sungai bengawan solo.
5. Untuk pelaksana kebijakan ini itu hanya sifatnya himbuan dan tidak mengena begitu untuk pengurangan angka penambangan pasir didaerah sungai bengawan solo. Karena itu pemerintah tidak memiliki wewenang banyak terkait penambangan pasir. Tetapi pemerintah, dinas dan penegak hukum yang terkait dalam kebijakan ini sangat berupaya menjalankan kebijakan ini dengan baik dalam pengendalian penambangan dengan sekal menertibkan penambang untuk diberikan arahan atau himbuan dan memberikan sosialisas ke beberapa daerah yang rawan penambangan pasir.”
6. Untuk sumber daya yang yang melibatkan dalam kebijakan ini tentang pengendalian penambangan pasir .tidak lain tidak bukan sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan yang rendah maka kalahnya daya saing mencari kerja diluar sana. Dan juga sumber daya ekonomi yang dimana tingkat ekonomi masyarakat yang rendah d

*bojonegoro masih tinggi yang menyebabkan masyarakat rela bekerja dengan resiko bahaya yang tinggi karena faktor ekonomi dan pendidikan masyarakatnya yang rendah.*

*7. Dalam pengimplementasian kebijakan ini ada beberapa kekuasaan, kepentingan akto yang terlibat dalam kebijakan ini seperti ibu bupati, kapolres, komandan kodim, kepala bakorwil, kepala balai besar bengawan solo dan juga kepala satpol pp. Yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini. Karena memiliki tugas dan fungsi berbeda beda dalam melaksanakan kebijakan.tentu kita tidak tinggal diam kita punya strategi dalam upaya pengendalian penambangan pasir seperti sosialisasi dan juga turun langsung mensidai para penambang pasir. Supaya para penambang pasir jera dan tidak menggurangi lagi kegiatan itu.*

*8. Pemertintah sebagai lembaga yang berkuasa dalam kebijakan ini sudah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan diwilayah sebagai upaya pengdalian penambangan pasir di Bojonegoro. pemerintah juga sudah melaksanakan kebijakan ini dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan para penambang pasir supaya mengetahui dampak dampak yang ditimbulkan dengan adanya penambangan pasir di sungai bengawan solo. Dan pemerntah juga bkerja sama dengan penegak hukum yang memiliki kuasa dan peran dalam menertibkan penambangan pasir dengan nantinya memberikan edukasi dan himbauan kepada para penambangan pasir agar dapat mentaat peraturan yang ada dan dapat menjaga lingkungan disekitarnya.*

*9. Kalau untuk kepatuhan dan daya tanggap kita pasti sarasanya masyarakat sekita bengawan solo. Karena masyarakat tersebut yan berpotensi sebagai penambang pasir. Kita sudah berupaya dalam melaksanakan kebijakan dalam pengendalian penambangan pasi di bengawan solo. Untuk kpatuhan ada beberapa penambang pasir sudah tidak atau berhenti beroprasional dalam penambangan pasir. Kita upaya kan agar penambang lain bisa meniru penambang lain yang sudah tidak beropasional yang sudah patuh dan mentaat peraturan yang ada.”*

#### *Faktor Penghambat*

*Faktor penghambat saya rasa kurangnya sumber daya ekonmi dan sumber daya manusia Karena ekonomi yang ada bisa membuka lapangan pekerjaan ada membuat pelatihan terhadap masyarakat agar mampu mengeluarkan keterampilan yang dimiliki. untuk kemampuan sumber daya manusia ya pasti yang belum terbentuk dan kurangnya daya minat berpendidikan karena faktor finansial juga yang mengakibatkan masyarakat memilih untuk berkerja dipenambangan pasir*

## PERTANYAAN

Informan Ibu Sripujianingsih selaku Staff bagian sumber daya alam Kabupaten Bojonegoro

Menurut Teori Grindlle:

1. Kepentingan kelompok sasaran
  - Dalam menjalankan kebijakan pengendalian penambangan pasir tentu saja melibatkan banyak kepentingan. Siapa sajakah pihak atau kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini?
2. Tipe Manfaat
  - Tipe manfaat seperti apa yang di terima oleh masyarakat ?
3. Perubahan yang diinginkan
  - Kebijakan yang di tetapkan melalui Peraturan Daerah Bojonegoro tentang penegdalian penambangan pasir tentu saja menghasilkan dampak dan perubahan yang signifikan Dampak dan perubahan seperti apa yang di dapatkan oleh sasaran kebijakan ini?
4. Pengambilan keputusan
  - Apakah pengambilan keputusan kebijakan pengendalian penambangan pasir sudah tepat sasaran sesuai dengan yang di targetkan oleh pemerintah dan jelaskan ?
5. Pelaksana kebijakan
  - Apakah Pelaksana kebijakan dalam Menjalankan kebijakan ini sudah baik dan jelaskan?
6. Sumber daya
  - Bagaimana dengan sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan ini?
7. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat
  - Siapa aja Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi aktor yang terlibat dalam implementas kebijakan tentang pengendalian penambangan pasir ini?
8. Karakter lembaga
  - Dalam pengaruh keberhasilan mengenai kebijakan ini, siapa saja pihak yang berkuasa dan berperan dalam implementasi kebijakan pertambangan pasir?
9. Kepatuhan dan daya tanggap
  - Sejauh mana kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran dalam menanggapi Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 1 tahun 2005 yang sudah dilaksanakan?

## JAWABAN

1. Tentu saja ada banyak kepentingan yang mempengaruhi kebijakan yang terutama masyarakat sekitar .kesadaran masyarkat juga sangat penting untuk mempengaruhi keijakan sehingga dampak negatif lingkungan yang dihasilkan dengan adanya penambangan pasir tidak terlalu parah yang bakal mengakibatkan lonsor.yang dapa membahayakan masyarakat sekitar juga.
2. Manfaat dari kebijakan itu sangat baik dengan adanya kebijakan itu. kegiatan penambangan pasir tidak merusak lingkungan hidup dan juga mengakibtakan bahaya bagi masyarakat. Kekayaan sumber daya alam di Kabupten Bojonegoro ini harus kita jaga bersama Untuk kita teruskan ke generasi kita yang akan dating agar generasi kita tidak menanggung akibat dari penambangan pasir.
3. Untuk perubahan dalam kebijakan ini agar masyarkat atau penambang pasir aga lebih taat peraturan yang ada karena penambangan itu sendiri bahaya bagi penambang dan lingkungan hidup agar tidak rusak yang diakibatkan msyarakat sendiri.
4. Akhir-akhir ini maraknya kegiatan penambangan pasir dibantaran sungai bengawan solo terutama di daerah bojonegoro. Kegiatan tersebut menjadi masalah yang serius karena dapat menimbulkan permasalahan yang baru. Saya kira sudah tepat sasaran Dengan adanya kebijakan itu agar membantu dalam pengendalian penambangan pasir
5. Untuk pelaksana kebijakan pemerintah sudah melakukan seperti sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat yang daerah rawan penambangan pasir agar selalu mentati peraturan atau kebijakan-kebijakan yang ada. Soialisasi ini diharapkan masyarakat bisa mengerti dampak dampak yang ditimbulkan dengan adanya penambangan. Sasaran sosialisasi ini ya pasti masyarakat sekitar dn juga para penambang pasir pemerintah sangat berupaya dalam enjalakan kebijakan ini dengan baik untuk mengendalikan penambangan pasir di Kabupaten Bojonegoro.
6. Sumber daya yang terlibat saya rasa sumber daya manusia. Karena tingkat kesadaran dalam berpendidikan yang masih kurang.keanyakan masyarakat berpendidikan paling tinggi sekolah dasar mau pun sekolah menengah pertama. Dan juga ekonom masyarakat yang rendah mengakibatkan mayarakat putus sekolah yang nantiya Itu yang mengkibatkan kalah daya saing terhadap mencari pekerjaan yang menyebabkan pengguran dan berpotensi bekerja sebagai penambangan pasir dibengawan solo.
7. Disini pemerintah dan penegak hukum yang memiliki kekuasaan dalam menjalakan kebijakan dan mempunyai strategi agar kebijakan ini berhasil. Tapi kita tidak lupa juga peran masyarakat sebagai aktor yang sangat penting seperti pengaduan yang memberikan infomasi bagi pemerintah dan penegak hukum supaya bisa menjalakan tugasnya

8. Saat ini pemerintah dengan dinas yang terkait dalam melaksanakan kebijakan ini sudah berjalan terutama pada para penambang dan masyarakat sebagai kelompok sasaran . ya pasti pemerintah, dinas dan penegak hkum yang berkuasa dalam kebijakan ini untuk mengendalikan pnambangan pasir di Bojonegoro agar lingkungan tidak semakin rusak karena penambangan pasir.

9. Alhamdulillah untuk kepatuhan dan daya tanggap masyarakat baik dengan pemerintah dan penegak hukum mengadakan sosialisasi masyakat bisa tau bahaya bag masyarakat atau para penambang dan lingkungan sekitar yang dampak nya bisa dialan i mereka sendiri. Semoga dengan adanya kebijakan ini dikit demi sedikit para penambang bisa berhenti beroprasional.

#### *Faktor Penghambat*

*Faktor penghambat saya rasa kurangnya sumber daya ekonmi dan sumber daya manusia. Karena ekonomi yang ada bisa membuka lapangan pekerjaan ada membua pelatihan terhadap masyarakat agar mampu mengeluarkan keterampilan yang dimiliki untuk kemampuan sumber daya manusia ya pasti yang belum terbentuk dan kurangnya daya minat berpendidikan karena faktor finansial juga yang mengakibatkan masyarakat memilih untuk berkerja dipenambangan pasir*

## PERTANYAAN

Informan Bapak Mashuri selaku masyarakat sekitar

Menurut Teori Grindle:

1. Kepentingan kelompok sasaran
  - Dalam menjalankan kebijakan pengendalian penambangan pasir tentu saja melibatkan banyak kepentingan. Siapa sajakah pihak atau kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini?
2. Tipe Manfaat
  - Tipe manfaat seperti apa yang di terima oleh masyarakat ?
3. Perubahan yang diinginkan
  - Kebijakan yang di tetapkan melalui Peraturan Daerah Bojonegoro tentang penegdalian penambangan pasir tentu saja menghasilkan dampak dan perubahan yang signifikan. Dampak dan perubahan seperti apa yang di dapatkan oleh sasaran kebijakan ini?
4. Pengambilan keputusan
  - Apakah pengambilan keputusan kebijakan pengendalian penambangan pasir sudah tepat sasaran sesuai dengan yang di targetkan oleh pemerintah dan jelaskan ?
5. Pelaksana kebijakan
  - Apakah Pelaksana kebijakan dalam Menjalankan kebijakan ini sudah baik dan jelaskan?
6. Sumber daya
  - Bagaimana dengan sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan ini?
7. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat
  - Siapa aja Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang pengendalian penambangan pasir ini?
8. Karakter lembaga
  - Dalam pengaruh keberhasilan mengenai kebijakan ini, siapa saja pihak yang berkuasa dan berperan dalam implementasi kebijakan pertambangan pasir?
9. Kepatuhan dan daya tanggap
  - Sejauh mana kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran dalam menanggapi Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 1 tahun 2005 yang sudah dilaksanakan?

## JAWABAN

1. Ya kalau untuk kepentingan yang mempengaruhi peraturan tentang penambangan pasir, ini saya pikir pemerintah yang tau kebijakan agar diterapkan diberbagai kecamatan atau desa desa yang rawan penambangan pasir
2. Kalau manfaat ya pasti berdampak pada lingkungan agar tidak longsor dan merusak lahan yang sebagai mayoritas masyarakat sekitar mempunyai perkebunan seperti jagung, padi dan juga kebun pisang di ada dibantaran sungai bengawan solo
3. Perubahan saat ini agar pemerintah bisa menerapkan kebijakan yang dikeluarkan dengan sesuai, agar kita masyarakat tidak diberatkan dengan peraturan-pertuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat mencegah kerusakan yang diakibatkan penambangan.
4. Dengan daerah sini dialiri sungai terpanjang dipulau jawa pasti berpotensi terjadinya penambangan pasir.semoga dengan adanya pengambilan keputusan kebijakan tersebut penambangan bisa berkurang ya..
5. Dalam pelaksana kebijakan pertambangan pasir ini masyarakat tidak dilibatkan secara langsung pada lapangan hanya sekedar himbauan saja dan sosialisasi tentang penambangan pasir terhadap dampak dampak yang ditimbulkan dan juga bahayanya penambangan pasir oleh pemerintah yang melibatkan masyarakat.”
6. Kalau sumber daya ya pasti sumber daya manusianya ya dalam melanjutkan berpendidikan sangat berat disuruh memikir lagi kebanyakan masyarakat sini memilih pekerjaan berat dari pada harus sekolah lagi dan juga ekonomi yang membuat masyarakat sangat keberatan dalam menjalani kehidupan sehari hari.
7. Untuk kebijakan ini saya fikir penegak hukum dan pemerintah ya yang memiliki kekuasaan dan strategi untuk meningkatkan kesadaran dalam mematuhi peraturan yang ada.
8. Pemerintah dan penegak hukum lah sebagai institusi yang bertanggung jawab dan berkuasa dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Agar kebijakan ini mencapai tujuan dalam arti kalau mencapai tujuan ya itu harus semua para panambang pasir dilakukan penindakan.
9. Untuk sasaranya ya saya para masyarakat yang berpotensi menjadi penambang pasir Untuk respon tentunya saya cukup senang dengan adanya sosialisasi kita mendapatkan perhatian dari pemerintah agar tau dampak-dampak yang bahaya bagi lingkungan dan masyarakat sendiri. Untuk kepatuhan saya akan patuh tapi tidak tau untuk oknum-oknum yang masih nakal memaksa untuk menambang pasir.

*Faktor Penghambat*

*Untuk penghambatnya sumber daya dari pemerintah yang masih kurang. Seperti kurangnya lapangan pekerjaan yang sekarang sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Apalagi sekarang sudah kalah saing dengan lulusan pendidikan tinggi dan Kurangnya suport dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini.”*

**PERTANYAAN**

Informan Bapak Samsudin selaku masyarakat sekitar

Menurut Teori Grindlle:

1. Kepentingan kelompok sasaran
  - Dalam menjalankan kebijakan pengendalian penambangan pasir tentu saja melibatkan banyak kepentingan. Siapa sajakah pihak atau kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini?
2. Tipe Manfaat
  - Tipe manfaat seperti apa yang di terima oleh masyarakat ?
3. Perubahan yang diinginkan
  - Kebijakan yang di tetapkan melalui Peraturan Daerah Bojonegoro tentang penegdalian penambangan pasir tentu saja menghasilkan dampak dan perubahan yang signifikan Dampak dan perubahan seperti apa yang di dapatkan oleh sasaran kebijakan ini?
4. Pengambilan keputusan
  - Apakah pengambilan keputusan kebijakan pengendalian penambangan pasir sudah tepat sasaran sesuai dengan yang di targetkan oleh pemerintah dan jelaskan ?
5. Pelaksana kebijakan
  - Apakah Pelaksana kebijakan dalam Menjalankan kebijakan ini sudah baik dan jelaskan?
6. Sumber daya
  - Bagaimana dengan sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan ini?
7. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat
  - Siapa aja Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang pengendalian penambangan pasir ini?
8. Karakter lembaga
  - Dalam pengaruh keberhasilan mengenai kebijakan ini, siapa saja pihak yang berkuasa dan berperan dalam implementasi kebijakan pertambangan pasir?
9. Kepatuhan dan daya tanggap
  - Se jauh mana kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran dalam menanggapi Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 1 tahun 2005 yang sudah dilaksanakan?

## JAWABAN

1. Untuk kepentingan yang ya sudah pasti pemeintah dengan dinas yang terkait. Selain itu juga kepentingan kepentingan yang bisa mempengaruhi kebijakan ini. Keluarga dan lingkungan sekitar juga bisa menjadi kepentingan dalam menjalankan implementas kebijakan.”
2. hmmm manfaatnya di lingkungan sekitar ya agar tidak membahayakan rumah yang ada dibantaran sungai bengawan solo.soal nya kalau musim hujan bengawn solo meluap. Takutnya Karena disekitar penambangan terdapat tnggul yang nanti takutnya longsor dan mengakibatkan banjir.
3. Saat ini masyrakat membutuhkan peran pemrintah dalam menertibkan para penambang yang ada. agar tidak merugikan satu sama lain karena dengan adanya kebijakan ini bisa merubah kondisi sekitar yang tadinya jalan rusak yang dilalui truk truk agar tidak dilalui truk-truk yang bermuatan pasir
4. Menurut saya sudah tepat karena daerah sini rawan penambangan pasir takutnya kalau terus terus dibiarin mengakibatkan dampak yang jelek keputusan ini cukup tepa karena sekarang kita lihat bersama banyaknya penambangan bisa merusak ladang perkebunan kita dan merusak jalan yang bisa mengakibtakan bahaya bagi masyarakat lain.
5. Pelaksana kebijakannya saya kira sudah berjalan dengan baik dengan adanya sosialisasi ke Kecamatan yang rawan terjadinya penambangan dapat mengurangi kegiatan penambangan diwilayah tersebut terutama di wilayah sini.
6. Melihat sekarang susahya mencari pekerjaan diluar sana dan kurangnya tingka kesadaran pendidikan dan tidak ada daya niat dalam berpendidikan yang lebih tinggi Memilih jalan alternatif yaitu berkerja di penambangan pasir soalnya masyarakat sudah malas berfikir melainan mengandalkan otot. Karena faktor ekonomi yang susah membuat para penmbang nekat pkerjaan berresiko ini.“
7. Kalau kekuasaan ya seperti pemerintah, polisi dan satpol pp. Mereka yang past memiliki kekuasaan kepentingan dan strategi Untuk menjalankan pengawasan dan menertibkan penambang penmbang pasir yang nakal. Agar tidak semena mena mengambil pasir yang menimbulkan dampak pada infrastruktur seperti longsor, jalan yang rusak karena dilalui truk bermuatan pasir. Supaya pemerintah da penegak hukum yng memiliki kuasa cepat bertindak semakin parah kedepannya.
8. Mungkin lembaga yang berkuasa penegak hukum dan pemerintah. Misalnya sosialisasi untuk masyarakat bantaran bengawan solo tapi ini tidak semua masyarakat sekitaran bengawan solo diberikan sosialisasi jadi yang bertanggung jawab yaiti

*pemerintah dan penengak hukum. Mau ga mau harus mempunyai cara agar masyarakat tidak melakuan kegiatan penambang pasir.*

*9. Untuk kepatuhan ya pasti kita sebagai warga indonesia harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada. Tapi itu menurut saya ya soalnya masih banyak oknum-oknum yang masih bandel yang melakukan kegiatan penambangan pasir. Tapi saya sebagai masyarakat ya tidak menyalahkan sepunhnyaa kepada oknum itu karena kita juga mencari nafkah.*

#### **Faktor Penghambat**

*Kalau faktor yang menghambat pasti ekonomi kalau pemerinah tidak membuka lapangan pekerjaan bagaimana penambang pasir mencari kerja untuk menafkahi keluarga sedangkan sekarang sangat susah mencari pekerjaan dengan pendidikan yang rendah. Mungkin itu sih faktor penghambatnya kenapa penambang masil ngenyel melakukan penambangan pasir*

## PERTANYAAN

Informan Bapak Lilik Khoirul selaku masyarakat sekitar

Menurut Teori Grindlle:

1. Kepentingan kelompok sasaran
  - Dalam menjalankan kebijakan pengendalian penambangan pasir tentu saja melibatkan banyak kepentingan. Siapa sajakah pihak atau kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini?
2. Tipe Manfaat
  - Tipe manfaat seperti apa yang di terima oleh masyarakat ?
3. Perubahan yang diinginkan
  - Kebijakan yang di tetapkan melalui Peraturan Daerah Bojonegoro tentang penegdalian penambangan pasir tentu saja menghasilkan dampak dan perubahan yang signifikan. Dampak dan perubahan seperti apa yang di dapatkan oleh sasaran kebijakan ini?
4. Pengambilan keputusan
  - Apakah pengambilan keputusan kebijakan pengendalian penambangan pasir sudah tepat sasaran sesuai dengan yang di targetkan oleh pemerintah dan jelaskan ?
5. Pelaksana kebijakan
  - Apakah Pelaksana kebijakan dalam Menjalankan kebijakan ini sudah baik dan jelaskan?
6. Sumber daya
  - Bagaimana dengan sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan ini?
7. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat
  - Siapa aja Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang pengendalian penambangan pasir ini?
8. Karakter lembaga
  - Dalam pengaruh keberhasilan mengenai kebijakan ini, siapa saja pihak yang berkuasa dan berperan dalam implementasi kebijakan pertambangan pasir?
9. Kepatuhan dan daya tanggap
  - Sejauh mana kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran dalam menanggapi Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 1 tahun 2005 yang sudah dilaksanakan?

## JAWABAN

1. Kalau kepentingan pasti semua memiliki kepentingan untuk menjalankan implementasi kebijakan dari pemerintah, dinas terkait, keluarga dan juga masyarakat sekitar. Dengan pemerintah melakukan penerapan langsung ke lokasi dan dinas melakukan sosialisasi guna tau dampak yang ditimbulkan. Dan keluarga memberitau bahayanya pekerjaan itu.
2. Untuk manfaatnya menciptakan suasana tenang karena terkadang para penambang itu terjadi konflik atau gesekan dengan penambangan sebelah atau penambang lain merebutkan wilayah penambangan. Yang mengganggu orang lain dan dapat membahayakan para penambang pasir. dengan adanya kebijakan ini semoga penambangan pasir bisa berkurang dan membuat tenang orang lain
3. Untuk saat ini masyarakat ingin perubahan yang baik agar lebih tenang dan aman dan dijauhkan dari bahaya. Dan juga dijauhkan dari kerusakan lingkungan yang sebagai lahan perkebunan masyarakat sekitar juga sebagai lahan mata pecaharian sehari hari.
4. Kebijakan ini dijalankan di Kabupaten Bojonegoro sangat tepat karena Bojonegoro alir sungai terpanjang di pulau Jawa pasti banyaknya penambang pasir yang nakal yang seenaknya mengambil pasir tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Keputusan kebijakan ini sangat tepat menurut saya dengan adanya kebijakan ini bisa terkendali.
5. Untuk pelaksanaan kebijakan ini harusnya sudah pada tempatnya dengan ada penertiban oleh pemerintah dan penegak hukum pelaksanaan ini sudah berjalan sehingga bisa mengendalikan penambangan pasir yang ada.”
6. Sulitnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan ditahun sekarang bisa dilihat sekarang teknologi sudah maju kita pasti sangat susah dalam mencari pekerjaan diluar sana. Kita memilih pekerjaan yang menggunakan otot karena minimnya pendidikan
7. kekuasaan pasti terdapat pada pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ini untuk mengendalikan penambangan pasir untuk melindungi lingkungan sekitar.
8. Polisi ya saya kira yang berkuasa dalam mengendalikan penambangan pasir dan pemerintah untuk berkerja sama dalam menegendalikan penambangan.”
9. Saya merasa senang dengan adanya sosialisasi ini saya dan masyarakat lain bisa tau dampak dari penambangan tersebut kebijakan ini juga di gunakan sebagai

*perlindungan penambang dan perlindungan lingkungan. Sosialisasi ini juga diharapkan agar kita patuh pada peraturan yang ada demi lingkungan sekitar juga*

#### **Faktor Penghambat**

*Ya gimana lagi ya, kalau penghambat pasti masih kurangnya alternatif pencaharian yang jelas untuk masyarakat. Karena masyarakat masih bergantung pada penambangan pasir sebagai mata pencaharian mereka. perlunya memberikan pelatihan agar bisa beralih pada bidang lain.*

## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



### UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi  
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 25 Maret 2024

Nomor : 0943K/FISIP/III/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal  
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Bapak/Ibu Sekretaris Daerah  
Kabupaten Bojonegoro

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	MOCH ULIL AZMI SUGYANTO	Dusun kanor, rt 03 rw 03 desa kanor, kecamatan kanor, Kabupaten Bojonegoro	085648297709

Guna melakukan pengambilan data di:

**"Kantor Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro"**

Dengan Judul Skripsi: **"Implementasi Kebijakan Pengendalian Penambangan Pasir Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro
4. Kepala Camat Kecamatan Kanor
5. Polsek Kecamatan Kanor
6. Kepala Desa Kanor

### Lampiran 3 Kartu Bimbingan



#### UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi  
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp 031-5991742, 5931800 psw. 159 email fisp@untag-sby.ac.id

#### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Moch Ulil Azmi Sugiyanto

NBI : 1112000122

Program Studi : Administrasi Negara

Dosen Pembimbing I : Drs. Supri Hartono, MS

Dosen Pembimbing II : Drs. Radjikan, M.Si

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN [REDAKSI] TENTANG PENGENDALIAN  
 PENAMBANGAN PASIR [REDAKSI] SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN  
 LINGKUNGAN DI KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO  
 JAWA TIMUR**

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	7/3	Disubstansi teori kepraktisan, ke-berkaitan	<i>[Signature]</i>	
2	14/3	Bab I, II, III. See.	<i>[Signature]</i>	
3	23/4	Bab I - III. Perbaikan, see. arah.		<i>[Signature]</i>
A.	29/4	Bab I - III - Acc.		<i>[Signature]</i>
5.	2/5/24	di kepalanya. mm. variabel.	<i>[Signature]</i>	
6.	7/5/24	Bab II - Teori, uraian, kepraktisan. Bab IV - perbandingan, kepraktisan.		<i>[Signature]</i>
7	14/5	Bab IV, V. See. kepraktisan	<i>[Signature]</i>	
8.	15/5/24	Bab I - IV. Acc. siap uji.		<i>[Signature]</i>



**Lampiran 4 Dokumentasi**

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN NARASUMBER**



Wawancara Dengan Ibu Musdholifah Selaku Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro



Wawancara Dengan Ibu Sripujianingsih sebagai Staff Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro



Wawancara dengan masyarakat sekitar bengawan solo dengan bapak Mashuri



Wawancara dengan masyarakat sekitar bengawan solo dengan bapak Samsudin



Wawancara dengan masyarakat sekitar bengawan solo dengan bapak Lilik Khoiru

### Dokumentasi Sungai Bengawan Solo



### Sungai Bengawan Solo



### Penambangan Pasir di Bengawan Solo



### Kondisi Akibat Penambangan Pasir



Alat Untuk Mencari Pasir Sudah Tidak Beroprasional



Alat Katrol Yang Sudah tidak Beropsinoal Untuk Menaikan Pasir Ke Truk



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Moch Ulil Azmi Sugiyanto

NIM : 1112000122

Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 27 Mei 2024

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGENDALIAN  
PENAMBANGAN PASIR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN  
LINGKUNGAN DI KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO  
JAWA TIMUR

Catatan Perbaikan:

1. Kurapan kurung di LBM
2. foto letak pasir sesuai panduan
3. Analisa pembekuan

Surabaya, 30 MEI 2024  
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

  
M. Rizki F.

  
M. Rizki F.

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Moch Ulii Azmi Suglyanto

NIM : 1112000122

Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 27 Mei 2024

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGENDALIAN PENAMBANGAN PASIR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO JAWA TIMUR

Catatan Perbaikan:

Perbaiki antara Judul → Kesimpulan <sup>harus</sup> sinkron.

Perbaiki penyusunan kalimat, perhatikan S-P-O-K.

Surabaya, 31 Mei 2024

Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

  
 Dida Rahmadanik, M.AP

  
 Dida Rahmadanik, M.AP.

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.